

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dan beberapa daerah perkotaan mempunyai pola perekonomian yang cenderung memperkuat terjadinya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang bermuara kepada tingginya angka pengangguran baik di daerah pedesaan dan perkotaan. Dualisme kota dan desa yang terdapat di Indonesia, seperti negara-negara berkembang lainnya telah mengakibatkan munculnya sektor formal dan sektor informal dalam kegiatan perekonomian. Kondisi ini selalu diwarnai kontraksi akibat ketegangan antara pasaran kerja dan pertumbuhan pencari kerja yang mewarnai paruh terbesar masyarakat perkotaan.

Kondisi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah yang relatif aman dan tentram menjadi salah satu faktor meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk, sehingga migrasi masuk lebih besar dari pada migrasi keluar. Persebaran penduduk desa-kota, menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk kota jauh lebih cepat dari pada pertumbuhan penduduk desa. Tingginya pertumbuhan penduduk kota ini antara lain karena faktor hambatan status desa menjadi kota dan upaya urbanisasi penduduk

Hubungan antara kota dan desa akan menjadi tidak seimbang karena adanya ketergantungan. Alasan ekonomi yang menjadi motivasi penduduk desa pindah ke kota. Bagi para individu, migrasi dapat dilihat sebagai investasi sumber daya manusia, karena migrasi sering dimotivasi oleh tingkat pendapatan di desa yang sangat rendah.

Timbulnya sektor informal di kota tidak terlepas dari latar belakang sejarah perekonomian tradisional yaitu perekonomian pedesaan yang sebagian besar didasarkan pada struktur pertanian dengan pola bercocok tanam sederhana. Karena rendahnya upah tenaga kerja di sektor pertanian dan semakin langkanya lahan-lahan pertanian di pedesaan, maka banyak tenaga kerja yang memilih alternatif lain untuk urbanisasi dan bekerja di sektor non pertanian.

Fenomena kegiatan ekonomi informal di Indonesia akan lebih menonjol di beberapa kota besar di Pulau Jawa, di mana tekanan penduduk sudah sedemikian kritis. Disamping itu, terbatasnya lapangan kerja dan poses industrialisasi yang terpusat di daerah perkotaan yang padat modal membawa konsekuensi bahwa hanya tenaga kerja terampil saja yang dapat memasuki sektor modern yang formal, sementara sektor informal pada saat yang bersamaan mengalami peningkatan dalam kapasitas intensitas dan jumlah kegiatannya (Mulyadi S, 2002).

Kegiatan sektor informal yang menonjol biasanya terjadi di kawasan yang sangat padat penduduknya, di mana pengangguran (*unemployment*) maupun pengangguran tersembunyi (*disguised unemployment*) merupakan

masalah yang utama. Dengan kenyataan seperti ini limpahan tenaga kerja tersebut masuk ke dalam sektor informal, tetapi masih di pandang sebagai penyelesaian sementara karena di dalam sektor informal sendiri terdapat persoalan yang sangat rumit.

Istilah “sektor informal” biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Sektor informal di kota terutama harus dipandang sebagai unit-unit berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu proses evolusi daripada dianggap sebagai sekelompok perusahaan yang berskala kecil dengan masukan-masukan (*inputs*) modal dan pengelolaan (*managerial*) yang besar.

Di dalam UU. Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Adapun usaha kecil tersebut meliputi : usaha kecil formal, usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Usaha kecil formal adalah usaha yang telah terdaftar, tercatat dan telah berbadan hukum, sementara usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima dan pemulung. Sementara usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun atau berkaitan dengan seni dan budaya

Sektor informal muncul dalam kegiatan perdagangan yang bersifat kompleks oleh karena menyangkut jenis barang, tata ruang, dan waktu. Berkebalikan dengan sektor formal yang umumnya menggunakan teknologi maju, bersifat padat modal, dan mendapat perlindungan pemerintah, sektor informal lebih banyak ditangani oleh masyarakat golongan bawah. Sektor informal dikenal juga dengan 'ekonomi bawah tanah' (*underground economy*). Sektor ini diartikan sebagai unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah (Hidayat, 1978). Sektor informal ini umumnya berupa usaha berskala kecil, dengan modal, ruang lingkup, dan pengembangan yang terbatas.

Peran sektor informal juga tetap perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Pengalaman membuktikan bahwa ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998, sektor informal justru menjadi juru selamat perekonomian. Sektor informal menjadi salah satu jawaban bagi masalah pengangguran.

Dalam kondisi tingkat pengangguran yang tinggi, sektor informal tumbuh menjadi penyelamat. Menurut Alisjahbana dalam bukunya "*Urban Hidden Economy*", Peran Tersembunyi Sektor Informal Perkotaan, sektor informal memiliki daya absorpsi tinggi dan tidak bertitik jenuh. Kesimpulan ini antara lain didapat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hampir setengah dari angkatan kerja di daerah perkotaan bekerja di luar sektor formal.

Menurut data Badan Pusat statistik (BPS), sektor informal menyerap 70 persen angkatan kerja yang bekerja dewasa ini, sementara sektor formal hanya 30 persen. Sektor informal yang diwakili usaha mikro, kecil dan

menengah (UMKM) menyumbang 55,8 persen produk domestik bruto (PDB) tahun 2005 dan 19 persen dari total ekspor.

Pesatnya perkembangan ekonomi dikebanyakan kota-kota sering tidak diimbangi oleh kesempatan kerja. Luapan angkatan kerja tersebut kemudian tertampung di sektor informal dengan produktivitas yang bersifat subsisten yaitu hanya untuk mempertahankan hidup. Memang tidak semua, tetapi kebanyakan sektor informal mempunyai kapasitas produksi yang rendah karena pemupukan modal dan investasinya lemah.

Penggunaan modal pada sektor informal relatif sedikit bila dibandingkan dengan sektor formal sehingga cukup dengan modal sedikit dapat mempekerjakan orang. Dengan menyediakan akses pelatihan dan ketrampilan, sektor informal dapat memiliki peran yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Sektor informal memunculkan permintaan untuk tenaga kerja semiterampil dan tidak terampil. Sektor informal biasanya menggunakan teknologi tepat guna dan menggunakan sumber daya lokal sehingga akan menciptakan efisiensi alokasi sumber daya.

Di satu sisi sektor informal masih memegang peranan penting menampung angkatan kerja, terutama angkatan kerja muda yang masih belum berpengalaman atau angkatan kerja yang pertama kali masuk pasar kerja. Keadaan ini dapat mempunyai dampak positif mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Tetapi di sisi lain menunjukkan gejala tingkat produktivitas yang rendah, karena masih menggunakan alat-alat tradisional dengan tingkat pendidikan serta keterampilan yang relatif rendah.

Tidak dapat dipungkiri krisis ekonomi yang melanda Indonesia juga mengakibatkan semakin banyak penduduk yang tidak mampu menjangkau pendidikan. Masalah lain yang dihadapi dalam bidang pendidikan adalah berlangsungnya pendidikan yang kurang bermakna bagi pengembangan pribadi dan watak peserta didik yang berakibat hilangnya kepribadian dan kesadaran akan makna dan hakiki kehidupan. Lemahnya pendidikan juga berakibat pada lemahnya pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga belum dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang pada gilirannya menjadi hambatan dalam menghadapi kerjasama dan persaingan global. Bagi individu akan menjadi hambatan dalam mencari pekerjaan, karena terbatas pada pendidikan yang mereka miliki. Tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keahlian tertentu menyebabkan mereka sulit menembus sektor formal. Sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat.

Tabel 1.1.
Penduduk DIY Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu di Kegiatan Informal menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama (Agustus 2007)

Kabupaten/ Kota	Lapangan Pekerjaan Utama					Jumlah Total
	1	2	3	4	5	
Kulon Progo	93.165	8.685	18.604	3.454	20.238	144.236
Bantul	71.311	27.681	66.275	10.775	43.303	219.345
Gunung Kidul	255.021	4.203	22.854	3.708	29.903	315.689
Sleman	103.221	12.208	54.891	16.016	33.752	220.088
Kota Yogyakarta	613	4.120	35.806	8.271	8.722	57.532
Jumlah/Total	523.331	56.897	198.430	42.224	136.008	956.890

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta Dalam Angka, 2007.

Keterangan :

1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan
2. Industri Pengolahan
3. Perdagangan besar, rumah makan, dan Hotel

4. **Jasa Kemasyarakatan**
5. **Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan Asuransi, Usaha persewaan bangunan)**

Tabel 1.1., menunjukkan bahwa jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2007 yang bekerja pada sektor informal sebanyak 956.890. Untuk lapangan pekerjaan pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan tenaga kerja sektor informal paling banyak terserap di kabupaten Gunung Kidul, sedangkan paling sedikit berada di Kota Yogyakarta. Hal ini salah satunya disebabkan faktor geografis, dimana Gunung Kidul masih banyak lahan pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan yang masih potensial daripada di Kota Yogyakarta.

Pada lapangan pekerjaan industri pengolahan, perdagangan besar, eceran, rumah makan, hotel dan lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan Asuransi, Usaha persewaan bangunan) tenaga kerja sektor informal paling banyak terserap di Kabupaten Bantul. Sedangkan Sleman menyerap tenaga kerja sektor informal paling banyak untuk lapangan pekerjaan jasa kemasyarakatan.

Keberadaan sektor informal yang merupakan salah satu diantara bentuk dari ekonomi kerakyatan, keberadaannya di era otonomi daerah merupakan potensi yang harus digali dan dikembangkan karena dapat menyerap tenaga kerja yang masih dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan dari pembangunan daerah, serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Mengingat peran sektor informal yang cukup positif dalam proses pembangunan, sudah sewajarnya nasib para pekerjanya dipikirkan. Beberapa kebijakan, baik langsung maupun tidak, untuk membantu pengembangan masyarakat melalui pembinaan kegiatan usaha pekerja di sektor informal memang sudah dilakukan. Namun ada kecenderungan kegiatan ekonomi di sektor informal dan nasib pekerja sektor informal belum banyak mengalami perubahan. Tanpa bermaksud mengurangi arti pentingnya kebijakan yang telah ada, kebijakan yang biasa diberikan kepada pengusaha besar mungkin dapat dikurangi, kemudian prioritas diberikan pada kegiatan sektor informal dan memihak pada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, sektor informal memiliki peranan penting dalam memberikan sumbangan bagi pembangunan perkotaan, karena sektor informal mampu menyerap tenaga kerja (terutama masyarakat kelas bawah) yang cukup signifikan sehingga mengurangi problem pengangguran diperkotaan dan meningkatkan penghasilan kaum miskin di perkotaan. Selain itu, sektor informal memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintahan kota. Menurut Tri Widodo (2006) usaha sektor informal juga telah memberikan kontribusi positif pada pembangunan ekonomi DIY dalam hal peningkatan output, penyediaan lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat.

Berdasar uraian diatas mengenai sektor informal di DIY, dengan melihat variabel-variabel yang mempengaruhinya. Dengan memusatkan perhatian yang demikian maka penelitian ini mengambil judul "Analisis

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Sektor Informal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

B. Batasan Masalah

Agar tidak menimbulkan salah penafsiran sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang, maka yang dimaksud dengan sektor informal dalam batasan masalah penelitian ini adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarap, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, jasa tambal ban, dan lain-lain beserta faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan sektor informal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu tingkat pendidikan, jumlah tenaga kerja, jam kerja dan modal kerja.

C. Rumusan Masalah

Berdasar uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan pada sektor informal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat pendidikan terhadap

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap pendapatan pada sektor informal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh jam kerja terhadap pendapatan pada sektor informal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh modal kerja terhadap pendapatan pada sektor informal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara umum merupakan upaya identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pada sektor informal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Meskipun hanya menggunakan regresi linear berganda, akan tetapi model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memasukkan variabel *dummy* yang membedakan jenis sektor informal dan letak sektor informal, sehingga dapat diketahui apakah jenis sektor informal dan letak sektor informal di kota ataupun desa berpengaruh terhadap tingkat pendapatan sektor informal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintah sebagai bahan pertimbangan dan masukkan dalam membuat kebijakan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat yang berhubungan dengan pengembangan sektor informal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.